FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI KERJASAMA EKONOMI DIGITAL INDONESIA-TIONGKOK TAHUN 2022-2023

Sari Amalia Dewi[1] dan Adryananta Rayyis[1]
[1]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
sariamalia@yahoo.com

Abstract

This study analyzes the underlying factors that shaped the formation of digital economic cooperation between Indonesia and China during the period of 2022–2023, within the broader context of global digital transformation and evolving bilateral relations. Amid the rise of China as a digital power and Indonesia's strategic efforts to modernize its economic infrastructure, digital cooperation has emerged as a pivotal component of both countries' foreign policy and economic agendas. The research adopts a qualitative explanatory method, using literature studies and documentary analysis to trace causal linkages between domestic drivers, foreign policy orientations, and structural factors in international cooperation. The theoretical framework integrates the concept of national interest, international cooperation theory, and digital economy strategy. Findings reveal that the convergence of Indonesia's infrastructure priorities under President Joko Widodo and China's Digital Silk Road initiative created a conducive environment for bilateral digital partnership. Key enabling factors include aligned economic interests, regulatory openness, and the strategic use of digital diplomacy. The study concludes that digital cooperation reflects a pragmatic adaptation of Indonesia's foreign policy to leverage economic opportunities while navigating the regional digital ecosystem shaped by China's technological rise.

***Keywords**: digital cooperation, national interest, foreign policy, Indonesia, China, digital economy*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya kerjasama ekonomi digital antara Indonesia dan Tiongkok pada periode 2022–2023, dalam konteks transformasi digital global dan dinamika hubungan bilateral kedua negara. Di tengah kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan digital dan upaya strategis Indonesia untuk memodernisasi infrastruktur ekonominya, kerjasama digital muncul sebagai elemen sentral dalam kebijakan luar negeri dan agenda ekonomi kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksplanatif, melalui studi pustaka dan analisis dokumen untuk menelusuri hubungan kausal antara faktor domestik, orientasi kebijakan luar negeri, dan struktur kerjasama internasional. Kerangka teoritis yang digunakan mengintegrasikan konsep kepentingan nasional, teori kerjasama internasional, dan strategi ekonomi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konvergensi antara prioritas infrastruktur Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan inisiatif Jalur Sutra Digital dari Tiongkok menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemitraan digital bilateral. Faktor pendorong utama meliputi keselarasan kepentingan ekonomi, keterbukaan regulasi, serta penggunaan diplomasi digital sebagai strategi kebijakan luar negeri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerjasama digital mencerminkan adaptasi pragmatis kebijakan luar negeri Indonesia dalam memanfaatkan peluang ekonomi di tengah konstelasi ekosistem digital yang semakin dipengaruhi oleh kebangkitan teknologi Tiongkok.

Kata Kunci: kerjasama digital, kepentingan nasional, kebijakan luar negeri, Indonesia, Tiongkok, ekonomi digital

PENDAHULUAN

Kerja sama internasional merupakan bagian dari politik luar negeri yang dijalankan oleh negara dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang telah berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan negara lain dalam berbagai bidang. Salah satu kerja sama yang dikembangkan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah kerja sama ekonomi digital, khususnya dengan Tiongkok.

Kerja sama ekonomi digital antara Indonesia dan Tiongkok mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 hingga 2023. Hal ini terlihat dari berbagai pertemuan bilateral, kesepakatan ekonomi, serta sinergi antara inisiatif domestik Indonesia dan strategi global Tiongkok. Salah satu bentuk konkret dari kerja sama ini adalah keterlibatan Indonesia dalam kerangka kerja Digital Silk Road (DSR) yang merupakan bagian dari Belt and Road Initiative (BRI) yang dipromosikan oleh Tiongkok. Dalam kerangka DSR ini, Tiongkok berupaya untuk mengembangkan infrastruktur dan ekosistem digital di negara-negara mitra, termasuk Indonesia. Inisiatif ini mencakup investasi dalam jaringan broadband, pengembangan pusat data, teknologi e-commerce lintas batas, serta peningkatan kapabilitas keamanan siber.

Indonesia, di sisi lain, tengah menjalankan strategi transformasi digital nasional yang menjadi salah satu prioritas pembangunan ekonomi. Pemerintah Indonesia, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, telah menekankan pentingnya digitalisasi sebagai elemen kunci dalam mempercepat pertumbuhan inklusif, efisiensi birokrasi, dan daya saing nasional. Strategi tersebut mencakup program Gerakan 100 Smart City, perluasan inklusi keuangan digital, serta percepatan pemerataan akses internet ke daerah-daerah terpencil.

Konteks inilah yang menjadi latar penting bagi terbentuknya kerja sama digital Indonesia–Tiongkok. Di satu sisi, Tiongkok menawarkan sumber daya finansial, teknologi, dan model pembangunan digital yang telah teruji di tingkat domestik dan regional. Di sisi lain, Indonesia memerlukan mitra strategis yang dapat mendukung agenda transformasi digital tanpa harus sepenuhnya bergantung pada negara-negara Barat atau perusahaan teknologi besar yang cenderung memiliki standar regulasi dan kepentingan geopolitik tersendiri. Kebutuhan akan diversifikasi kerja sama teknologi menjadi penting dalam menjaga kedaulatan digital dan ruang manuver diplomasi Indonesia.

Kerja sama digital Indonesia–Tiongkok juga mencerminkan pergeseran pola diplomasi ekonomi yang semakin pragmatis. Sejak awal masa jabatan Presiden Joko Widodo, arah kebijakan luar negeri Indonesia telah bergerak dari orientasi normatif ke arah yang lebih instrumental—yakni menjadikan hubungan luar negeri sebagai sarana untuk mencapai pembangunan nasional. Strategi ini tercermin dalam penguatan diplomasi infrastruktur, perdagangan digital, dan konektivitas regional. Dalam kerangka tersebut, digitalisasi tidak hanya dipahami sebagai agenda teknologi, tetapi juga sebagai sarana diplomasi ekonomi dan transformasi struktural.

Namun demikian, kajian ilmiah mengenai kerja sama digital Indonesia–Tiongkok masih relatif terbatas, terutama dari perspektif hubungan

internasional dan kepentingan nasional. Sejauh ini, sebagian besar studi masih berfokus pada aspek ekonomi makro atau teknologi informasi, tanpa menggali bagaimana kerja sama tersebut terbentuk melalui proses politik luar negeri dan diplomasi ekonomi yang kompleks. Belum banyak penelitian yang menjelaskan bagaimana pemerintah Indonesia mengartikulasikan kebutuhan domestiknya ke dalam agenda kerja sama bilateral dengan Tiongkok, khususnya dalam ranah digital. Padahal, kerja sama ini tidak hanya merupakan hasil pertemuan antara dua kebijakan nasional, tetapi juga bagian dari pergeseran arsitektur kerjasama digital di kawasan Indo-Pasifik.

Di sisi lain, Tiongkok juga memiliki kepentingan strategis dalam memperluas pengaruh digitalnya di Asia Tenggara. Digital Silk Road menjadi instrumen penting dalam upaya Tiongkok membangun jalur ekonomi alternatif yang lebih tahan terhadap tekanan geopolitik dari Amerika Serikat dan sekutunya. Melalui kerja sama digital dengan Indonesia, negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara dengan pasar digital yang sangat besar, Tiongkok memperoleh mitra kredibel yang memperkuat posisi strategisnya di kawasan. Dengan demikian, hubungan digital ini memiliki muatan politik luar negeri yang tidak dapat dipisahkan dari konteks persaingan geopolitik yang lebih luas.

Situasi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan penting: Mengapa Indonesia memilih mempererat kerja sama digital dengan Tiongkok pada periode 2022–2023? Faktor-faktor domestik apa yang mendorong terbentuknya hubungan ini? Dan bagaimana kerja sama ini dapat dipahami dalam konteks kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih luas?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi dasar dari studi ini, yang bertujuan untuk menjelaskan dinamika pembentukan kerja sama digital Indonesia–Tiongkok secara lebih mendalam. Dengan menelusuri interaksi antara kondisi domestik Indonesia, strategi luar negeri Tiongkok, serta dinamika hubungan bilateral, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana kerja sama digital terbentuk, dijalankan, dan diarahkan oleh kepentingan strategis kedua negara.

Selain itu, penelitian ini juga penting untuk melihat posisi Indonesia dalam lanskap regional kerja sama digital. Sebagai negara yang mendorong tatanan digital inklusif di ASEAN, Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap teknologi global dan perlindungan atas kedaulatan data serta infrastruktur strategis. Kerja sama dengan Tiongkok harus dipahami tidak hanya dari sisi manfaat ekonomi, tetapi juga dari sisi kapasitas negara dalam mengelola kompleksitas geopolitik dan interdependensi digital yang meningkat.

Struktur artikel ini disusun untuk mendukung analisis tersebut. Bagian kedua menyajikan studi pustaka yang menguraikan konsep-konsep utama dalam hubungan internasional, kerja sama digital, dan strategi geoekonomi. Bagian ketiga menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan untuk menelusuri keterkaitan antara faktor domestik dan struktur kerja sama bilateral. Bagian keempat memaparkan hasil dan analisis atas dinamika kerja sama Indonesia–Tiongkok dalam bidang digital. Bagian terakhir menyimpulkan temuan utama, serta memberikan implikasi bagi pengembangan kebijakan luar negeri dan arah kerja sama digital Indonesia ke depan.

KERANGKA ANALISIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritik tiga tingkat: teori besar (*grand theory*), teori tingkat menengah (*middle theory*), dan teori terapan (*applied theory*) untuk memahami dinamika kerja sama digital antara Indonesia dan Tiongkok dalam kerangka hubungan internasional. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kerangka konseptual yang menyeluruh dalam menjelaskan bagaimana kepentingan nasional, struktur kawasan, dan kebijakan konkret saling mempengaruhi dalam pembentukan kerja sama ekonomi digital bilateral. Kerangka ini juga memungkinkan penelitian untuk menavigasi kompleksitas relasi bilateral yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga strategis dan simbolik.

Grand Theory: Realisme

Realisme merupakan salah satu pendekatan dominan dalam studi hubungan internasional. Dalam perspektif realis, negara adalah aktor utama yang bertindak secara rasional untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam sistem internasional yang anarkis (Waltz, 1979). Kepentingan utama negara adalah bertahan hidup, menjaga kedaulatan, dan memperkuat posisi strategisnya. Kerja sama internasional, menurut realisme, bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana instrumental untuk mencapai kepentingan strategis.

Dalam konteks kerja sama digital Indonesia-Tiongkok, pendekatan realis dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana kedua negara melihat kerja sama tersebut sebagai cara untuk memperkuat posisi masing-masing dalam ekonomi global yang kompetitif. Indonesia memanfaatkan kerja sama ini untuk mengakses teknologi dan pembiayaan yang dibutuhkan dalam modernisasi ekonomi digital, sementara Tiongkok memperluas pengaruh geoekonominya melalui ekspansi *Digital Silk Road*. Dengan demikian, kerja sama ini tidak bebas nilai, tetapi dibentuk oleh kalkulasi kekuasaan dan kepentingan masing-masing negara.

Teori realisme juga menekankan pentingnya *self-help* dan asimetri kekuasaan dalam hubungan bilateral. Dalam konteks ini, Indonesia perlu menyeimbangkan antara menerima manfaat dari kerja sama digital dengan Tiongkok dan menghindari ketergantungan teknologi yang berlebihan. Literatur seperti Mearsheimer (2001) dan Morgenthau (1948) menegaskan bahwa negara-negara kecil harus mengelola hubungan dengan negara besar melalui strategi pragmatis yang menghindari subordinasi. Relevansi pendekatan realis juga terlihat dari bagaimana Indonesia mengelola diplomasi teknologi secara selektif, dengan membuka ruang kerja sama sambil mempertahankan otonomi kebijakan nasional.

Middle Theory: Menengah: Teori Kerja Sama Internasional dan Geoeconomics

Teori tingkat menengah dalam penelitian ini mencakup dua pendekatan yang saling melengkapi: teori kerja sama internasional dan pendekatan *geoeconomics*.

Teori kerja sama internasional menjelaskan bagaimana negara-negara membangun mekanisme institusional untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan keuntungan bersama. Menurut Keohane (1984), kerja sama dapat terjadi bahkan dalam sistem internasional yang anarkis jika negara-negara menemukan kepentingan yang saling melengkapi dan menciptakan norma serta institusi yang mendukung.

Dalam kasus Indonesia dan Tiongkok, kerja sama digital tidak terlepas dari keberadaan institusi dan forum multilateral seperti *ASEAN-China Digital Economy Cooperation Initiative* dan kerangka kerja *BRI*. Institusi ini menyediakan platform koordinasi dan legitimasi normatif bagi implementasi proyek-proyek digital seperti pembangunan infrastruktur TIK, kerja sama *fintech*, dan harmonisasi standar digital. Partisipasi Indonesia dalam forum-forum tersebut menunjukkan bahwa kerja sama bilateral tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi difasilitasi oleh rezim internasional dan kepemimpinan institusional yang adaptif.

Di sisi lain, pendekatan *geoeconomics* melihat interaksi ekonomi sebagai instrumen politik. Menurut Blackwill dan Harris (2016), negara menggunakan alat ekonomi seperti perdagangan, investasi, dan teknologi untuk mencapai tujuan strategis dalam kompetisi global. Digitalisasi menjadi medan baru dalam kompetisi geopolitik, di mana infrastruktur digital dan standar teknologi menjadi alat untuk membentuk ketergantungan dan pengaruh.

Dalam konteks ini, *Digital Silk Road* bukan hanya proyek ekonomi, melainkan strategi Tiongkok untuk membentuk tata kelola digital global alternatif terhadap dominasi Barat. Indonesia sebagai negara mitra harus mengkaji implikasi jangka panjang dari keterlibatan dalam proyek ini, termasuk aspek kedaulatan data, keamanan siber, dan interoperabilitas teknologi. Penerimaan terhadap teknologi Tiongkok dalam proyek-proyek infrastruktur digital nasional memperlihatkan bahwa *geoeconomics* bukan hanya tentang investasi, tetapi juga tentang nilai strategis jangka panjang dalam relasi negara.

Teori Terapan: Konsep Kerja Sama Ekonomi Digital

Kerangka terapan dari penelitian ini merujuk pada konsep kerja sama ekonomi digital sebagai fenomena baru dalam hubungan internasional. Kerja sama ini mencakup integrasi lintas negara dalam bidang infrastruktur digital, perdagangan elektronik, keamanan digital, dan tata kelola data lintas batas.

Menurut Kshetri (2017), ekonomi digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politis karena melibatkan isu-isu sensitif seperti akses terhadap data, regulasi algoritma, dan monopoli platform digital. Oleh karena itu, kerja sama digital memerlukan keharmonisan kebijakan, kejelasan regulasi, dan kesepahaman strategis antara negara-negara mitra.

Dalam konteks Indonesia dan Tiongkok, kerja sama ini terwujud melalui proyek-proyek konkret seperti pembangunan pusat data, kolaborasi perusahaan teknologi, dan pelatihan sumber daya manusia di sektor TIK. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi secara aktif menjalin kemitraan dengan mitra Tiongkok seperti Huawei, *Alibaba Cloud*, dan *Tencent*.

Selain itu, kebijakan nasional seperti Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia juga menjadi dasar kebijakan domestik yang sejalan dengan kerja sama regional. Di sisi Tiongkok, kebijakan *Made in China 2025* dan *China Standards 2035* memperkuat dorongan ekspor standar teknologi dan integrasi digital dengan negara-negara mitra *BRI*. Kesesuaian

antara prioritas kebijakan domestik Indonesia dan strategi global Tiongkok menciptakan ruang sinergi yang memfasilitasi percepatan implementasi kerja sama digital bilateral.

Literatur tambahan dari Zeng (2020), deLisle (2021), dan Gaspers (2022) menunjukkan bahwa *Digital Silk Road* tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga mencerminkan cara Tiongkok menata ulang pengaruh globalnya di era pasca-hegemoni Barat. Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia perlu dianalisis sebagai bagian dari dinamika globalisasi alternatif yang lebih berorientasi pada kontrol negara dan integrasi vertikal. Studi seperti Shen (2022) juga menyoroti pentingnya transparansi dan keberlanjutan dalam proyek-proyek *DSR*, yang menjadi perhatian utama negara mitra seperti Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kontrol atas arsitektur digital nasional.

Dengan pendekatan bertingkat ini, studi pustaka dalam penelitian ini bertujuan memberikan kerangka konseptual yang mampu menjelaskan tidak hanya mengapa kerja sama digital Indonesia–Tiongkok terbentuk, tetapi juga bagaimana ia beroperasi di bawah struktur kekuasaan, dinamika institusional, dan strategi kebijakan yang saling terkait.

Pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak reduksionis, tidak hanya melihat kerja sama digital sebagai fenomena teknologi atau ekonomi semata, tetapi sebagai arena interaksi strategis dalam sistem internasional yang terus berubah. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya berkontribusi terhadap literatur kerja sama digital, tetapi juga memperluas wacana hubungan internasional ke dalam ranah transformasi digital global dan diplomasi teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *explanatory* untuk menggali dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kerja sama digital antara Indonesia dan Tiongkok pada periode 2022–2023. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelusuri keterkaitan antara kondisi domestik, kebijakan luar negeri, serta struktur geopolitik dan geoekonomi yang lebih luas. Fokus dari metode *explanatory* adalah untuk menemukan hubungan kausal antara motivasi politik, kepentingan strategis, dan implementasi kebijakan dalam kerja sama bilateral di bidang ekonomi digital.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari berbagai dokumen dan publikasi resmi, termasuk peraturan pemerintah, siaran pers kementerian, laporan organisasi internasional, hasil riset dari lembaga kajian, serta artikel-artikel jurnal akademik dan media daring kredibel. Pendekatan ini juga memperhatikan keberagaman sumber agar tercapai triangulasi data yang memadai untuk menjamin validitas analisis.

Kriteria pemilihan sumber dilakukan secara purposif, yaitu hanya mencakup dokumen dan publikasi yang relevan dengan topik kerja sama digital Indonesia–Tiongkok. Penelusuran data dilakukan melalui basis data elektronik seperti Google Scholar, JSTOR, serta situs resmi pemerintah Indonesia dan Tiongkok, termasuk publikasi dari ASEAN dan lembaga think-tank yang aktif dalam isu kerja sama ekonomi dan digital.

Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*). Teknik ini dipilih karena mampu mengidentifikasi pola-pola berulang dalam narasi kebijakan, pernyataan resmi, dan kecenderungan kebijakan luar negeri yang terkait dengan kerja sama digital. Proses ini mencakup tahap-tahap sebagai berikut: 1) Reduksi data, yaitu seleksi terhadap informasi yang relevan dengan fokus penelitian; 2) Kategorisasi data berdasarkan tema-tema utama: faktor domestik Indonesia, strategi Tiongkok melalui *Digital Silk Road*, serta dinamika bilateral; dan 3) Interpretasi temuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara determinan strategis dan kemunculan kerja sama digital dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Selama proses analisis, peneliti juga melakukan *cross-check* terhadap data dari berbagai sumber dan mencatat perbedaan narasi atau framing kebijakan untuk mempertajam argumentasi. Teknik interpretatif digunakan untuk menilai bagaimana kerja sama digital ini ditampilkan dalam kerangka diskursif Indonesia sebagai negara berkembang yang ingin memperkuat daya saing digitalnya.

Selain itu, pendekatan kualitatif ini juga memperhatikan konteks temporal dan spasial dari kerja sama yang diteliti. Artinya, kerja sama digital Indonesia–Tiongkok dianalisis bukan hanya sebagai fenomena tahun 2022–2023 semata, tetapi juga sebagai bagian dari evolusi kebijakan luar negeri Indonesia dalam dekade terakhir. Konteks waktu juga memperkuat pemahaman tentang bagaimana pergeseran struktur ekonomi global dan tekanan geopolitik membentuk perilaku negara-negara berkembang dalam membangun kemitraan teknologi.

Metodologi yang digunakan tidak bertujuan menghasilkan generalisasi, melainkan pemahaman mendalam (in-depth understanding) atas dinamika yang spesifik dalam studi kasus ini. Dengan demikian, penelitian ini bersifat eksploratif sekaligus menjelaskan (*exploratory and explanatory*) dalam upayanya menyusun kerangka analisis yang kokoh dan relevan dengan studi hubungan internasional kontemporer.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menyumbangkan perspektif teoritis dan praktis dalam memahami bagaimana negara-negara seperti Indonesia merespons peluang dan tantangan yang muncul dari transformasi digital global melalui kerja sama strategis dengan aktor utama seperti Tiongkok.

PEMBAHASAN

Dinamika Ekonomi Digital di Indonesia

Ekonomi digital memainkan peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama pasca-pandemi COVID-19 yang mempercepat digitalisasi di berbagai sektor. Pandemi mendorong perusahaan untuk mengadopsi model kerja jarak jauh yang membutuhkan penguatan infrastruktur teknologi informasi, sistem keamanan, manajemen tugas digital, serta komunikasi daring. Perubahan ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi membentuk kebiasaan baru dalam interaksi ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.

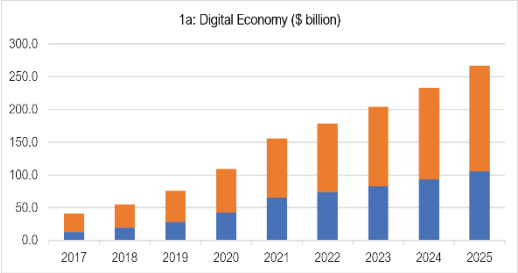

Bagan 1 Digital Economy Outlook Indonesia (Muchtar, 2023)

Menurut data dari Tanjung (2023), kontribusi sektor ekonomi digital terhadap PDB Indonesia meningkat dari 3,66% pada 2019 menjadi 6,04% pada 2021. Kenaikan signifikan ini menunjukkan transformasi struktural yang sedang berlangsung, di mana aktivitas ekonomi semakin bergeser ke platform digital. Faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ini meliputi bonus demografi, peningkatan penetrasi internet, dan ekspansi pesat sektor *e-commerce* dan *financial technology* (*fintech*). Pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3,85% pada Januari 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, memperkuat basis konsumen digital nasional.

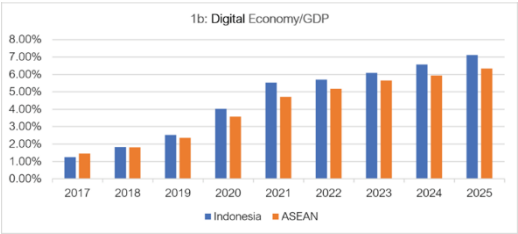

Bagan 2 Digital GDP Outlook Indonesia (Sumber: Muchtar, 2023)

Ekonomi digital di Indonesia juga mencakup perusahaan-perusahaan konvensional yang bertransformasi secara digital. *Fintech*, misalnya, menghadirkan solusi layanan keuangan yang lebih mudah diakses, mencakup pembayaran, pembiayaan, dan investasi. Hal ini memperluas inklusi keuangan dan mendorong efisiensi dalam ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia pun aktif memfasilitasi pertumbuhan sektor ini melalui kebijakan dan regulasi pro-investasi serta pembangunan infrastruktur digital yang merata.

Secara regional, Indonesia menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN. Pada 2021, Indonesia menyumbang 42% dari total ekonomi digital kawasan, meskipun hanya menyumbang sekitar 36% dari total PDB ASEAN. Dominasi ini menempatkan Indonesia dalam posisi strategis, tidak hanya sebagai pasar digital, tetapi juga sebagai mitra kunci dalam agenda konektivitas digital kawasan. Arus investasi ke sektor digital Indonesia meningkat tajam, dari USD 4,5 miliar pada 2020 menjadi USD 9,1 miliar pada 2021, mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek digitalisasi Indonesia (Muchtar, 2023).

Gambar 1 dan Gambar 2 dari Muchtar (2023) memperlihatkan proyeksi positif pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Ekonomi digital diukur dari pendapatan delapan segmen: *e-commerce*, kesehatan digital, aplikasi, media digital, periklanan digital, layanan elektronik, rumah pintar, dan *fintech*. Prospek ke depan mengindikasikan ekspansi lebih lanjut, didorong oleh dukungan kebijakan pemerintah, kesiapan teknologi, dan adopsi konsumen.

Namun, pertumbuhan ini tidak tanpa tantangan. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang adaptif untuk mengatasi isu seperti perlindungan data, kesenjangan literasi digital, dan potensi dominasi oleh platform digital asing. Transformasi digital juga menuntut reformasi struktural dalam tata kelola, hukum persaingan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Faktor Pendorong Kerja Sama Digital Indonesia–Tiongkok

Kerja sama ekonomi digital Indonesia–Tiongkok tidak bisa dilepaskan dari

kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi global. Transformasi ekonomi Tiongkok sejak era Deng Xiaoping melalui *open door policy* mempercepat integrasi negara tersebut ke dalam pasar global. Puncak dari strategi ini adalah peluncuran inisiatif *One Belt One Road* (OBOR) pada 2013, termasuk komponen *Digital Silk Road* yang menyasar infrastruktur digital lintas negara.

Bagi Indonesia, keterlibatan dalam OBOR membuka akses terhadap investasi infrastruktur digital dan peluang integrasi dalam ekosistem teknologi Tiongkok. Proyek *Digital Silk Road* mencakup pembangunan pusat data, jaringan 5G, dan konektivitas maritim berbasis digital yang relevan dengan agenda Poros Maritim Dunia Indonesia.

Faktor eksternal lainnya adalah pergeseran arsitektur geopolitik global. Ketidakefektifan strategi perimbangan kekuatan oleh Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik, serta meningkatnya tekanan terhadap tatanan digital yang didominasi Barat, membuka ruang bagi Indonesia untuk memainkan diplomasi non-blok dengan memanfaatkan hubungan dengan Tiongkok. Indonesia, dalam posisi ini, mencoba menavigasi antara keuntungan pragmatis dari kerja sama digital dan kebutuhan untuk menjaga otonomi strategisnya.

Dari sisi internal, kerja sama digital dengan Tiongkok sejalan dengan visi pembangunan infrastruktur Presiden Joko Widodo. Dalam dua periode pemerintahannya, Jokowi menempatkan infrastruktur, termasuk digital, sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sejak 2014, prioritas ini diarahkan melalui percepatan pembangunan nasional yang berfokus pada tiga pilar utama: pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kebijakan deregulasi.

Reformasi deregulasi mencakup penyederhanaan perizinan, pemangkasan birokrasi, dan peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini menciptakan ekosistem yang lebih ramah terhadap investasi digital, baik dari dalam maupun luar negeri. Target peningkatan sektor pariwisata dan penciptaan lapangan kerja turut didukung oleh kebijakan bebas visa kunjungan singkat (BVKS) kepada Tiongkok dan empat negara lainnya sejak 2015, sebagai bagian dari strategi keterbukaan ekonomi (Mardhiyyah, 2023).

Kebijakan poros maritim yang digaungkan Jokowi sejak awal pemerintahannya memperluas ruang kerja sama dengan Tiongkok, terutama dalam konteks konektivitas digital maritim. Poros Maritim Dunia, yang dituangkan dalam Perpres No. 16 Tahun 2017, menempatkan laut sebagai pusat pembangunan nasional dan diplomasi kawasan. Hal ini mencakup doktrin konektivitas antarpulau dan strategi pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, yang memiliki implikasi langsung terhadap kerja sama pelabuhan cerdas dan logistik digital (Syahrin, 2018).

Dengan integrasi ini, Poros Maritim dan *Digital Silk Road* saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan konektivitas kawasan. Strategi ini memperlihatkan bahwa kerja sama digital bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga bagian dari arsitektur diplomasi Indonesia di era Jokowi.

Kebijakan Indonesia yang Mendukung Kerja Sama Digital

Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi investasi menjadi tulang punggung upaya Indonesia mendorong transformasi digital. Sejak 2016, pemerintah meluncurkan berbagai reformasi untuk mempercepat izin usaha, menyederhanakan prosedur, dan mengintegrasikan layanan publik secara digital. Langkah ini menciptakan ekosistem yang lebih ramah terhadap investasi digital, baik dari dalam maupun luar negeri.

Kebijakan bebas visa kunjungan singkat (BVKS) yang diberikan kepada Tiongkok dan negara lainnya juga menjadi sinyal keterbukaan ekonomi, termasuk dalam kerja sama pariwisata digital. Pemerintah memandang sektor ini sebagai bagian dari ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan melalui platform digital lintas negara.

Kebijakan poros maritim yang digaungkan Jokowi sejak awal pemerintahannya memperluas ruang kerja sama dengan Tiongkok, terutama dalam konteks konektivitas digital maritim. Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia menjadi dasar strategis untuk mengintegrasikan aspek teknologi informasi ke dalam kebijakan maritim nasional. Ini membuka peluang bagi sinergi antara Poros Maritim dan *Digital Silk Road*, terutama dalam pembangunan pelabuhan pintar dan sistem logistik berbasis digital.

Kebijakan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) juga menjadi instrumen penting yang memperkuat agenda digital nasional. Regulasi ini membuka ruang kolaborasi dengan penyedia teknologi dari Tiongkok dalam pengembangan layanan publik digital, *cloud computing*, dan sistem keamanan siber.

Evaluasi dan Prospek Ke Depan

Kerja sama digital Indonesia–Tiongkok telah memberikan manfaat nyata dalam bentuk peningkatan investasi, transfer teknologi, dan ekspansi infrastruktur digital. Namun demikian, terdapat tantangan yang tidak bisa diabaikan. Ketergantungan pada teknologi asing, khususnya dari Tiongkok, dapat menimbulkan risiko keamanan data dan kedaulatan digital.

Untuk itu, Indonesia perlu memperkuat tata kelola digital nasional, termasuk perlindungan data pribadi, interoperabilitas sistem, dan regulasi teknologi strategis. Strategi diversifikasi mitra teknologi, peningkatan kapasitas nasional, dan penguatan diplomasi digital ASEAN dapat menjadi penyeimbang yang diperlukan.

Di sisi lain, kerja sama digital dengan Tiongkok memberikan Indonesia peluang untuk meningkatkan daya saing global, memperkuat posisi di ASEAN, dan mempercepat integrasi ekonomi digital nasional. Ke depan, Indonesia perlu memastikan bahwa kerja sama ini dijalankan secara setara, transparan, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang nasional.

Dengan demikian, kerja sama ekonomi digital Indonesia–Tiongkok bukan hanya refleksi dari hubungan bilateral, tetapi juga cerminan dari strategi Indonesia dalam menavigasi dunia yang semakin terdigitalisasi dan terdiferensiasi secara geopolitik. Keberhasilan kerja sama ini akan ditentukan oleh sejauh mana Indonesia mampu menyeimbangkan antara pragmatisme pembangunan dan prinsip kedaulatan digital dalam tatanan dunia multipolar.

KESIMPULAN

Kerja sama ekonomi digital antara Indonesia dan Tiongkok pada periode 2022–2023 mencerminkan strategi Indonesia dalam merespons transformasi digital global dan perubahan geopolitik kawasan. Dalam menghadapi era digitalisasi, Indonesia melihat Tiongkok sebagai mitra strategis untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur digital, perluasan akses teknologi, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Transformasi digital Indonesia diperkuat oleh komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur dan ekosistem teknologi melalui kebijakan deregulasi, program Poros Maritim Dunia, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Langkah-langkah ini membuka ruang bagi keterlibatan investor global dan memperkuat fondasi kerja sama teknologi lintas negara.

Di sisi lain, Tiongkok melalui inisiatif *Digital Silk Road* mendorong ekspansi pengaruh teknologi globalnya ke negara-negara mitra, termasuk Indonesia. Kerja sama ini menunjukkan adanya konvergensi antara kebutuhan domestik Indonesia dan agenda geoekonomi Tiongkok, khususnya dalam proyek seperti pembangunan pusat data, pelabuhan cerdas, dan pengembangan layanan digital publik.

Namun, kerja sama ini tidak lepas dari risiko. Ketergantungan pada teknologi asing dapat memengaruhi kedaulatan digital dan keamanan data nasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengelola hubungan ini dengan pendekatan yang seimbang: memperkuat perlindungan data, meningkatkan literasi digital, dan mengembangkan kapabilitas teknologi dalam negeri.

Kerja sama digital ini juga mencerminkan transformasi pendekatan diplomasi Indonesia yang semakin pragmatis dan berbasis hasil nyata. Pendekatan *diplomasi membumi* yang diusung Presiden Joko Widodo menekankan pada manfaat konkret bagi pembangunan nasional, menjadikan kerja sama ini sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar proyek simbolis.

Untuk menjamin keberlanjutan dan manfaat jangka panjang, Indonesia harus memperkuat posisi tawarnya melalui diplomasi aktif di forum internasional dan kawasan seperti ASEAN. Diversifikasi mitra teknologi, pengembangan kapasitas riset nasional, serta dukungan terhadap start-up lokal menjadi langkah krusial guna menghindari ketergantungan yang tidak sehat.

Dengan pendekatan yang hati-hati namun terbuka, kerja sama ekonomi digital Indonesia–Tiongkok dapat menjadi model kolaborasi strategis yang mendukung pembangunan nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola digital global yang lebih inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Monograf

Morgenthau, H. J. (1948). Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York: Alfred A. Knopf.

Waltz, K. N. (1979). Theory of International Politics. Reading, MA: Addison-Wesley.

Artikel Jurnal dan Laporan Akademik

Blackwill, R. D., & Harris, J. M. (2016). *War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Kshetri, N. (2017). 1 The Emerging Role of Big Data in Key Development Issues: Opportunities, Challenges, and Concerns. *Big Data for Development*, 1–24.

Sumber Pemerintah dan Kebijakan Nasional

Humas. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Artikel, Data, dan Sumber Berita Terkait

Ahmad Albar Tanjung. (2023). Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB Indonesia. *Kompasiana.com*. https://www.kompasiana.com

Muchtar, A. (2023). *Digital Economy Outlook Indonesia 2021–2025*. Jakarta: Kementerian Kominfo.

Iasya Mardhiyyah. (2023). Peran Strategis BVKS dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Indonesia.go.id*.

Sari, I. (2016). ASEAN dan Peran Maritim Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*.

Syahrin, H. (2018). Gagasan Poros Maritim dan Implementasi Kebijakan Kelautan Indonesia. *Maritime Journal*.

Muhammad Tri Andika. (2017). Peran Idiosinkratik Presiden dalam Politik Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(2), 203–218.

Darulingga, R. (2023). OBOR dan Strategi Geoekonomi Tiongkok. *Pusat Kajian Kawasan Tiongkok, UI*.

Zeng, J. (2020). China's Digital Belt and Road Initiative. *Journal of Contemporary China*, 29(122), 270–285.

deLisle, J. (2021). China's Rise in the Global Digital Order. *Asia Policy*, 31, 5–17.

Gaspers, J. (2022). Digital Authoritarianism with Chinese Characteristics. *MERICS Papers on China*.

Shen, H. (2022). Building Digital Sovereignty: Global Norms and China's Technology Diplomacy. *Global Media and Communication*, 18(2), 157–176.